



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI  
DANA DESA UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Rekening Kas Kalurahan adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
4. JLPONG adalah hasil pembagian jumlah Lurah dan Pamong Kalurahan suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah Lurah dan Pamong Kalurahan se-Kabupaten Bantul.
5. JBAMUS adalah hasil pembagian jumlah Personil Badan Permusyawaratan Kalurahan suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah Personil Badan Permusyawaratan Kalurahan se-Kabupaten Bantul.
6. JRT adalah hasil pembagian jumlah personil Ketua Rukun Tetangga suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah personil Ketua Rukun Tetangga se-Kabupaten Bantul.
7. JSPONG merupakan hasil pembagian jumlah personil staf Kalurahan suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah staf pamong Kalurahan se-Kabupaten Bantul.
8. JHONR adalah hasil pembagian jumlah staf honorer suatu Kalurahan terhadap keseluruhan jumlah Staf Honorer Kalurahan se-Kabupaten Bantul.

9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teraturoleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau atau pemerintah kabupaten untuk program Jaminan Kesehatan.
11. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
12. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
14. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
15. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
17. Bupati adalah Bupati Bantul.
18. Panewu adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
19. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah I yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

BAB II  
PENGELOLAAN ADD  
Bagian Kesatu  
Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam APBD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat kepada Daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Kalurahan untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua  
Penentuan Besaran ADD Untuk Setiap Kalurahan

Pasal 4

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 94.047.000.000,00 (sembilan puluh empat milyar empat puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Jumlah ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkurang dari Pagu Anggaran Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (3) Pengurangan sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada masing-masing Kalurahan dan menjadi penghitung pengurangan besaran ADD Tahun 2022 dari besaran ADD tahun 2021.
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebagai berikut:
  - a. 50% (lima puluh persen) dari Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yaitu Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dibagi rata 75 (tujuh puluh lima) Kalurahan.
  - b. 50% (lima puluh persen) dari Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yaitu Rp1.500.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dihitung dengan formula.

(5) Pengurangan Besaran ADD berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b untuk masing-masing Kalurahan dihitung dengan variable sebagai berikut :

- a. JLPONG sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. JBAMUS sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. JRT sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. JSPONG sebesar 5% (lima Persen); dan
- e. JHONR sebesar 5% (lima persen).

### Bagian Ketiga

#### Pengurangan Besaran Dana ADD untuk Setiap Kalurahan

##### Pasal 5

(1) Pengurangan besaran ADD bagi setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, dihitung sebagai berikut :

$$\text{Rp}1.500.000.000,00 : 75 = \text{Rp}. 20.000.000,00$$

(2) Pengurangan besaran ADD bagi setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dihitung dengan cara :

$$\text{Rp}1.500.000.000,00 \times \{(20\% \times \text{JLPONG}) + (10\% \times \text{JBAMUS}) + (10\% \times \text{JRT}) + (5\% \times \text{JSPONG}) + (5\% \times \text{JHORN})\}.$$

(3) Besaran Pengurangan ADD setiap Kalurahan merupakan hasil penjumlahan dari penghitungan ayat (1) dan ayat (2).

(4) Besaran pengurangan ADD untuk masing-masing Kalurahan, Besaran ADD tahun 2022 dan pembagian setiap bulannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keempat

#### Penggunaan ADD

##### Pasal 6

(1) ADD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, khususnya untuk :

- a. Pemenuhan penghasilan tetap minimal Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan staf honorer Kalurahan;
- b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. Biaya operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan;

- d. Operasional Pemerintah Kalurahan;
  - e. Insentif/Operasional Rukun Tetangga (RT);
  - f. Pemenuhan tunjangan-tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - g. Tunjangan Jaminan Kesehatan bagi Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
- (2) Dalam hal kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, ADD diutamakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan yang lain.

Bagian Kelima  
Mekanisme Penyaluran

Paragraf 1  
Umum

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan setelah Peraturan Kalurahan tentang APBKal dan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal diundangkan.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara transfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kalurahan sebanyak 12 (dua belas) tahap.

Paragraf 2

Mekanisme Penyaluran Bulan Januari Tahun 2022

Pasal 8

- (1) Persyaratan pencairan Besaran ADD Bulan Januari tahun 2022 :
- a. fotokopi Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2022;
  - b. bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
  - c. kwitansi;
  - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Kalurahan; dan
  - e. fotokopi Rekening Kas Kalurahan (RKK).
- (2) Lurah menyampaikan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Panewu disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal 21 (dua puluh satu) bulan Januari tahun berjalan.

- (3) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Januari tahun berjalan, Panewu mengajukan permohonan penyaluran ADD untuk seluruh Kalurahan di wilayah masing-masing kepada Bupati Cq. Kepala DPMK dilampiri :
  - a. rekapitulasi jumlah permohonan dana ADD tiap Kalurahan; dan
  - b. lembar penelitian berkas pengajuan penyaluran ADD.
- (4) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Januari tahun berjalan, Kepala DPMK mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati Cq.
- (5) Penyaluran ADD bulan Januari Tahun 2022 dilakukan paling lambat akhir bulan Januari 2022 tahun berjalan

### Paragraf 3

#### Mekanisme Penyaluran Setelah Bulan Januari 2022

### Pasal 9

- (1) Persyaratan pencairan besaran ADD setelah bulan Januari 2022 adalah :
  - a. bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
  - b. kwitansi;
  - c. fotokopi rekening koran bulan sebelumnya;
  - d. fotokopi NPWP Pemerintah Kalurahan;
- (2) Lurah mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Panewu disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, Panewu mengajukan permohonan penyaluran ADD untuk seluruh Kalurahan di wilayah masing-masing kepada Bupati Cq. Kepala DPMK dengan dilampiri :
  - a. rekapitulasi jumlah permohonan Besaran ADD per Kalurahan; dan
  - b. lembar penelitian berkas pengajuan penyaluran ADD lembar penelitian berkas pengajuan penyaluran ADD.



- (4) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya Kepala Dinas DPMK mengajukan permohonan pencairan dana ADD kepada Bupati Cq. Kepala DPKPAD.
- (5) Penyaluran ADD bulan berikutnya dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

#### Paragraf 4

#### Pemotongan dan Penyetoran Jaminan Kesehatan dari Alokasi ADD

#### Pasal 10

- (1) Penanggung jawab administrasi JKN Kalurahan melakukan entri data kepesertaan melalui aplikasi *e-dabu* untuk Lurah, Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Dukuh paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (2) Penanggung jawab administrasi JKN Pemerintah Kabupaten melakukan persetujuan melalui aplikasi *e-dabu* atas entri yang dilakukan oleh penanggung jawab administrasi JKN Kalurahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya untuk tagihan iuran bulan berikutnya.
- (3) BPJS Kesehatan menyampaikan tagihan iuran mulai tanggal 1 (satu) bulan berjalan kepada Pemerintah Kabupaten cq. Kepala BPKPAD.
- (4) BPKPAD selaku PPKD melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Kalurahan yang diajukan setiap bulannya.
- (5) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.
- (6) Pembayaran langsung iuran kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (7) Pelaksanaan pemotongan dan penyetoran iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai bulan Januari 2022.
- (8) BPKPAD melakukan transfer ADD langsung ke Rekening Kas Kalurahan (RKK) setelah dikurangi tagihan iuran BPJS Kesehatan.

### BAB III PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Lurah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Panewu setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan ADD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKal.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panewu, DPMK dan Perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.
- (4) Badan Permusyawaratan Kalurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBKal.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 13 Januari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 13 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA  
 DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK  
 SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KALURAHAN	ADD TAHUN 2021 SETIAP KALURAHAN	ALOKASI PENGURANGAN BAGI RATA	ALOKASI PENGURANGAN DENGAN FORMULA	ADD TAHUN 2022 SETIAP KALURAHAN	PEMBULATAN ADD TAHUN 2022
1	Poncosari	1,694,774,273	20,000,000.00	23,980,000.00	1,650,794,273.00	1,650,794,000.00
2	Trimurti	1,530,967,606	20,000,000.00	22,796,000.00	1,488,171,606.00	1,488,172,000.00
3	Gadingsari	1,421,267,483	20,000,000.00	20,456,000.00	1,380,811,483.00	1,380,811,000.00
4	Gadingharjo	933,026,952	20,000,000.00	14,054,000.00	898,972,952.00	898,973,000.00
5	Srigading	1,393,199,190	20,000,000.00	21,683,000.00	1,351,516,190.00	1,351,516,000.00
6	Murtigading	1,304,921,040	20,000,000.00	23,024,000.00	1,261,897,040.00	1,261,897,000.00
7	Tirtomulyo	1,232,791,604	20,000,000.00	19,838,000.00	1,192,953,604.00	1,192,954,000.00
8	Parangtritis	1,149,264,726	20,000,000.00	16,570,000.00	1,112,694,726.00	1,112,695,000.00
9	Donotirto	1,180,647,097	20,000,000.00	19,548,000.00	1,141,099,097.00	1,141,099,000.00
10	Tirtosari	937,305,801	20,000,000.00	15,054,000.00	902,251,801.00	902,252,000.00

NO	KALURAHAN	ADD TAHUN 2021 SETIAP KALURAHAN	ALOKASI PENGURANGAN BAGI RATA	ALOKASI PENGURANGAN DENGAN FORMULA	ADD TAHUN 2022 SETIAP KALURAHAN	PEMBULATAN ADD TAHUN 2022
11	Tirtoharjo	932,802,816	20,000,000.00	12,920,000.00	899,882,816.00	899,883,000.00
12	Seloharjo	1,435,490,409	20,000,000.00	21,000,000.00	1,394,490,409.00	1,394,490,000.00
13	Panjangrejo	1,340,188,407	20,000,000.00	24,240,000.00	1,295,948,407.00	1,295,948,000.00
14	Srihardono	1,468,764,381	20,000,000.00	26,035,000.00	1,422,729,381.00	1,422,729,000.00
15	Sidomulyo	1,423,920,511	20,000,000.00	25,171,000.00	1,378,749,511.00	1,378,750,000.00
16	Mulyodadi	1,296,154,979	20,000,000.00	20,447,000.00	1,255,707,979.00	1,255,708,000.00
17	Sumbermulyo	1,455,282,362	20,000,000.00	26,983,000.00	1,408,299,362.00	1,408,299,000.00
18	Caturharjo	1,328,348,291	20,000,000.00	17,199,000.00	1,291,149,291.00	1,291,149,000.00
19	Triharjo	1,318,995,371	20,000,000.00	19,962,000.00	1,279,033,371.00	1,279,033,000.00
20	Gilangharjo	1,505,873,520	20,000,000.00	21,929,000.00	1,463,944,520.00	1,463,945,000.00
21	Wijirejo	1,172,668,912	20,000,000.00	18,178,000.00	1,134,490,912.00	1,134,491,000.00
22	Triwidadi	1,682,852,725	20,000,000.00	20,447,000.00	1,642,405,725.00	1,642,406,000.00
23	Sendangsari	1,599,022,237	20,000,000.00	22,762,000.00	1,556,260,237.00	1,556,260,000.00
24	Guwosari	1,443,753,264	20,000,000.00	21,863,000.00	1,401,890,264.00	1,401,890,000.00
25	Palbapang	1,196,728,355	20,000,000.00	20,445,000.00	1,156,283,355.00	1,156,283,000.00
26	Ringinharjo	965,515,620	20,000,000.00	14,984,000.00	930,531,620.00	930,532,000.00
27	Bantul	1,127,917,811	20,000,000.00	19,515,000.00	1,088,402,811.00	1,088,403,000.00
28	Trirenggo	1,480,155,286	20,000,000.00	26,017,000.00	1,434,138,286.00	1,434,138,000.00
29	Sabdodadi	934,185,105	20,000,000.00	12,821,000.00	901,364,105.00	901,364,000.00
30	Patalan	1,447,638,978	20,000,000.00	26,184,000.00	1,401,454,978.00	1,401,455,000.00
31	Canden	1,341,746,268	20,000,000.00	20,237,000.00	1,301,509,268.00	1,301,509,000.00

NO	KALURAHAN	ADD TAHUN 2021 SETIAP KALURAHAN	ALOKASI PENGURANGAN BAGI RATA	ALOKASI PENGURANGAN DENGAN FORMULA	ADD TAHUN 2022 SETIAP KALURAHAN	PEMBULATAN ADD TAHUN 2022
32	Sumberagung	1,434,352,767	20,000,000.00	24,401,000.00	1,389,951,767.00	1,389,952,000.00
33	Trimulyo	1,403,595,055	20,000,000.00	25,117,000.00	1,358,478,055.00	1,358,478,000.00
34	Selopamioro	1,850,990,723	20,000,000.00	24,758,000.00	1,806,232,723.00	1,806,233,000.00
35	Sriharjo	1,237,077,481	20,000,000.00	19,616,000.00	1,197,461,481.00	1,197,461,000.00
36	Wukirsari	1,597,987,027	20,000,000.00	21,075,000.00	1,556,912,027.00	1,556,912,000.00
37	Kebonagung	933,047,587	20,000,000.00	13,165,000.00	899,882,587.00	899,883,000.00
38	Karangtengah	976,493,136	20,000,000.00	14,347,000.00	942,146,136.00	942,146,000.00
39	Girirejo	940,337,869	20,000,000.00	12,079,000.00	908,258,869.00	908,259,000.00
40	Karangtalun	932,613,558	20,000,000.00	12,736,000.00	899,877,558.00	899,878,000.00
41	Imogiri	933,200,562	20,000,000.00	10,532,000.00	902,668,562.00	902,669,000.00
42	Mangunan	1,026,157,437	20,000,000.00	16,825,000.00	989,332,437.00	989,332,000.00
43	Muntuk	1,344,288,009	20,000,000.00	21,702,000.00	1,302,586,009.00	1,302,586,000.00
44	Dlingo	1,138,801,722	20,000,000.00	17,577,000.00	1,101,224,722.00	1,101,225,000.00
45	Temuwuh	1,201,263,838	20,000,000.00	18,079,000.00	1,163,184,838.00	1,163,185,000.00
46	Terong	1,068,778,238	20,000,000.00	17,128,000.00	1,031,650,238.00	1,031,650,000.00
47	Jatimulyo	1,226,164,497	20,000,000.00	15,624,000.00	1,190,540,497.00	1,190,540,000.00
48	Baturetno	1,136,089,369	20,000,000.00	21,247,000.00	1,094,842,369.00	1,094,842,000.00
49	Banguntapan	1,535,914,102	20,000,000.00	28,393,000.00	1,487,521,102.00	1,487,521,000.00
50	Jagalan	933,069,768	20,000,000.00	9,679,000.00	903,390,768.00	903,391,000.00
51	Singosaren	932,794,972	20,000,000.00	9,521,000.00	903,273,972.00	903,274,000.00
52	Jambidan	1,077,981,896	20,000,000.00	17,987,000.00	1,039,994,896.00	1,039,995,000.00

NO	KALURAHAN	ADD TAHUN 2021 SETIAP KALURAHAN	ALOKASI PENGURANGAN BAGI RATA	ALOKASI PENGURANGAN DENGAN FORMULA	ADD TAHUN 2022 SETIAP KALURAHAN	PEMBULATAN ADD TAHUN 2022
53	Potorono	1,174,520,637	20,000,000.00	20,294,000.00	1,134,226,637.00	1,134,227,000.00
54	Tamanan	1,067,268,408	20,000,000.00	17,388,000.00	1,029,880,408.00	1,029,880,000.00
55	Wirokerten	1,156,166,714	20,000,000.00	16,130,000.00	1,120,036,714.00	1,120,037,000.00
56	Wonokromo	1,258,906,937	20,000,000.00	20,003,000.00	1,218,903,937.00	1,218,904,000.00
57	Pleret	1,266,732,955	20,000,000.00	20,646,000.00	1,226,086,955.00	1,226,087,000.00
58	Segoroyoso	1,163,220,071	20,000,000.00	15,824,000.00	1,127,396,071.00	1,127,396,000.00
59	Bawuran	1,070,008,076	20,000,000.00	14,025,000.00	1,035,983,076.00	1,035,983,000.00
60	Wonolelo	972,807,926	20,000,000.00	13,925,000.00	938,882,926.00	938,883,000.00
61	Sitimulyo	1,605,373,839	20,000,000.00	24,651,000.00	1,560,722,839.00	1,560,723,000.00
62	Srimulyo	1,730,420,159	20,000,000.00	26,538,000.00	1,683,882,159.00	1,683,882,000.00
63	Srimartani	1,540,529,516	20,000,000.00	21,669,000.00	1,498,860,516.00	1,498,861,000.00
64	Pendowoharjo	1,485,914,487	20,000,000.00	25,922,000.00	1,439,992,487.00	1,439,992,000.00
65	Timbulharjo	1,553,370,925	20,000,000.00	26,801,000.00	1,506,569,925.00	1,506,570,000.00
66	Bangunharjo	1,580,860,674	20,000,000.00	24,893,000.00	1,535,967,674.00	1,535,968,000.00
67	Panggungharjo	1,472,703,474	20,000,000.00	29,472,000.00	1,423,231,474.00	1,423,231,000.00
68	Bangunjiwo	1,837,446,795	20,000,000.00	25,496,000.00	1,791,950,795.00	1,791,951,000.00
69	Tirtonirmolo	1,394,598,633	20,000,000.00	20,292,000.00	1,354,306,633.00	1,354,307,000.00
70	Tamantirto	1,352,410,224	20,000,000.00	22,287,000.00	1,310,123,224.00	1,310,123,000.00
71	Ngestiharjo	1,471,094,144	20,000,000.00	23,486,000.00	1,427,608,144.00	1,427,608,000.00
72	Argodadi	1,450,595,259	20,000,000.00	20,185,000.00	1,410,410,259.00	1,410,410,000.00
73	Argorejo	1,303,831,574	20,000,000.00	20,091,000.00	1,263,740,574.00	1,263,741,000.00

NO	KALURAHAN	ADD TAHUN 2021 SETIAP KALURAHAN	ALOKASI PENGURANGAN BAGI RATA	ALOKASI PENGURANGAN DENGAN FORMULA	ADD TAHUN 2022 SETIAP KALURAHAN	PEMBULATAN ADD TAHUN 2022
74	Argosari	1,210,604,991	20,000,000.00	16,250,000.00	1,174,354,991.00	1,174,355,000.00
75	Argomulyo	1,390,442,589	20,000,000.00	25,802,000.00	1,344,640,589.00	1,344,641,000.00
JUMLAH		97,047,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	94,047,000,000.00	94,047,000,000.00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH